



Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah

Fandy Adpen Lazzavietamsi^a

^a STKIP PGRI Tulungagung

¹ fandyadpen@gmail.com

Informasi artikel

Kata kunci:

Jiwa Warga
Negara
Ki Ageng
Suryomentaraman
Pesantren

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pondok pesantren Putra Menara Al Fattah dalam membangun jiwa warga negara, yang saat ini sudah tersudut oleh sistem pendidikan modern dan dianggap kurang relevan oleh zaman namun justru setia mendidik jiwa melalui sistem pendidikan yang mengedepankan keadaban sekitar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus tunggal karena terdapat ciri khas sistem pendidikan pesantren yang tidak mengajarkan materi kewarganegaraan namun mengamalkan nilai-nilai kewarganegaraan. Nilai kewarganegaraan bersumber dari nilai agama yang langsung diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari didalam pondok pesantren putra menara Al Fattah. Transformasi nilai tersebut melalui proses pembangunan jiwa warga negara seperti yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryomentaraman. Ajaran Ki Ageng Suryomentaraman merupakan implementasi dari hakikat ajaran agama. Sebagai bangsa yang religius, lembaga keagamaan termasuk pondok pesantren merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa yang berarti membangun jiwa warga negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa membangun warga negara berarti membangun manusia yang mempunyai aspek mendasar yaitu jiwa. Pondok pesantren Putra Menara Al Fattah telah berdiri sejak tahun 1935 M dan melaksanakan pendidikan agama islam dengan pendekatan tradisional dengan mengedepankan prinsip laku spiritual sesuai ajaran Nabi Muhammad SAW. Melalui proses pendidikan tersebut jiwa santri dibentuk menjadi manusia yang beriman sekaligus warga negara yang baik.

ABSTRACT

Building a Perspective Citizen Soul Ki Ageng Suryomentaraman at the Menara Al Fattah Islamic Boarding School. This study aimed describing the Putra Menara Al Fattah boarding school in building citizens' souls, which are currently cornered by the modern education system and are considered less relevant by the times instead of faithfully educate the soul through an educational system that promotes civilization around. This study uses a single case study research method because there are characteristics of the boarding school education system that do not teach citizenship material but practice the values of citizenship. Citizenship value comes from religious values which are directly implemented in everyday life in the Putra Menara Al Fattah boarding school. The transformation of that value is through the process of building citizens' souls as taught by Ki Ageng Suryomentaraman. The teachings of Ki Ageng Suryomentaraman are the implementation of the nature of religious teachings. As a religious nation, religious institutions including Islamic boarding schools are the main foundation in building a nation which means building the soul of citizens. The results of the study show that building citizens means building people who have fundamental aspects, namely the soul. Putra Menara Al Fattah boarding school was established in 1935 AD and carried out Islamic religious education with a traditional approach by promoting the principle of spiritual practice according to the teachings of the Prophet Muhammad. Through the process of education, the soul of the student is formed into human beings who are both faithful and good citizens.

Keywords:

Citizen's Soul
Ki Ageng
Suryomentaraman
Pesantren

Copyright © 2018 (Fandy Adpen Lazzavietamsi). All Right Reserved

How to Cite: Lazzavietamsi, F. (2019). Membangun Jiwa Warga Negara Perspektif Ki Ageng Suryomentaraman di Pondok Pesantren Menara Al Fattah. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 3(2), 71-77.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pesta demokrasi yang ditandai dengan pemilu serentak kepala daerah dan pemilihan presiden telah menjadi topik paling hangat dimasyarakat (Baihaki, 2018). Politik untuk merebut kekuasaan menjadi sarana untuk mencapai tujuan individu dan kelompok yang berada dibalik panggung politik. Apakah kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat bukan soal yang utama meskipun setiap calon penguasa menjadi wajib untuk menampilkan visi semu memperjuangkan kepentingan rakyat. Rakyat dituntut untuk kritis dan aktif dalam berbagai persoalan politik mengingat adagium demokrasi dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat yang artinya setiap rakyat demokrasi harus bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat meskipun pilihan tersebut tidak menampilkan wajah asli.

Untuk itu menjadi warga negara yang melek politik sangat penting agar dapat menyingkap setiap persoalan politik yang dihadapi, sehingga tidak hanya menjadi warga negara yang tahu namun juga mau dan mampu (Azis Wahab & Sapriya, 2011) untuk menjadi warga negara Indonesia yang menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik menjadi relevan untuk dirumuskan dalam rangka mengurai persoalan tersebut dan persoalan politik warga negara menjadi tugas bersama antara tokoh, pemangku kebijakan, para cendekia dan lembaga pendidikan.

Pondok pesantren tradisional sebagai lembaga pendidikan informal sangat berperan dalam mendidik warga negara, dalam hal ini berkaitan dengan moral spiritual warga negara yang terdapat dalam jiwa manusia. Jiwa terdapat dalam diri manusia yang bersifat immaterial dan mempunyai daya sedangkan tubuh material namun tidak mempunyai daya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018). Sehingga tubuh merupakan manifestasi dari setiap jiwa manusia. Komponen utama dalam sebuah negara yaitu penduduk yang disebut warga negara. Sehingga setiap persoalan negara mayoritas bersumber dari warga negara, artinya bagaimana sebuah negara tergantung pada bagaimana warga negaranya. Untuk itu membangun warga negara merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana membangun jiwa warga negara melalui pondok pesantren salaf (tradisional)?

Metode

Penelitian membangun jiwa warga negara di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah menggunakan desain kualitatif dengan metode studi kasus tunggal. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan melibatkan unsur kyai, pengurus dan santri pondok. Pemilihan metode studi kasus didasari atas ciri khas pondok pesantren Putra Menara Al Fattah sebagai pondok pesantren tradisional yang tetap mempertahankan model pendidikan pesantren yang tidak hanya melalui pengajaran namun juga melalui laku spiritual. Hubungan murid dan guru terikat tidak hanya secara psikologis namun juga secara metafisis. Responden terdiri dari kyai, guru ngaji, pengurus pondok dan santri, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi teknik, sumber data dan waktu.

Hasil dan pembahasan

1. Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah

Pondok pesantren Putra Menara Al Fattah sebagai pondok pesantren salaf selalu diasosiasikan dengan pondok pesantren dengan sistem pendidikan tradisional karena mempelajari kitab-kitab kuning dengan metode pendidikan yang berbeda dengan pondok modern. Perbedaan yang paling mencolok yaitu kedekatan antara kyai dan santri, dalam proses pendidikan dan pengajaran seringkali kyai terjun langsung untuk menangani santri (Dofir, 2011). Sebelum politik etis diberlakukan oleh belanda (Wikipedia, 2013), pendidikan pesantren dilaksanakan berdasarkan adat istiadat yang berlaku disekitar pondok pesantren, misalnya dari segi bahasa yang digunakan maupun implementasi ajaran agama islam dalam kehidupan sosial. Metode tersebut meliputi ta'lim atau transfer ilmu, tadrīs atau mengamalkan ilmu, ta'dīb atau disiplin, dan tarbiyah atau membangun (Muchlishon, 2016).

Proses pendidikan tersebut senada dengan kaidah pendidikan Ki Hadjar Dewantara yaitu panca dharma yang terdiri dari kodrat alam, kebudayaan, kemanusiaan, kemerdekaan, kebangsaan (Dewantara, 2013). Kaidah tersebut di transformasikan melalui nilai-nilai ajaran agama islam dan nilai-nilai kebudayaan yang berkembang pada masyarakat sekitar pondok pesantren. Didalam pendidikan pondok pesantren tradisional proses pendidikan hati lebih ditekankan sebagai inti dari pendidikan jiwa manusia. Pada periode berikutnya pendidikan pesantren ditekan oleh sistem pendidikan dari budaya eropa yang lebih menekankan kepada pembentukan akal pikiran manusia.

Ki Hadjar Dewantara dalam pemikiran pendidikan dan kebudayaan menegaskan bahwa sistem pendidikan pondok pesantren tradisional merupakan sistem yang tepat untuk dijadikan sebagai sistem pendidikan nasional. Alasan utama Ki Hadjar Dewantara adalah biaya pendidikan yang lebih murah dibandingkan biaya pendidikan modern. Sebagai lembaga pendidikan tertua di Indonesia pesantren memiliki peranan penting dalam membangun bangsa dan mendampingi negara Indonesia, tercatat dalam sejarah perjalanan di Nusantara mulai dari sebelum kerajaan majapahit sampai terbentuknya sebuah negara yaitu negara Indonesia (Herman, 2013). Pada mulanya pesantren dibentuk untuk tujuan menyiapkan pada pengajar dan penganjur ajaran agama islam di masyarakat, sehingga lulusan pesantren ada yang mengajarkan pelaksanaan ajaran islam melalui pesantren namun juga ada yang tidak melalui pesantren.

Pada umumnya seorang raja pasti memiliki penasehat yang merupakan tokoh agama tertentu, diantaranya yaitu kyai. Pesantren tidak berpolitik namun secara tidak langsung tokoh-tokoh pesantren yaitu kyai menjadi penasihat seorang raja. Sehingga secara otomatis pesantren mempengaruhi proses politik yang diberlakukan oleh pemangku kebijakan. Meskipun seperti itu kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah dilakukan sejak zaman Sriwijaya, sebagai kerajaan dengan mayoritas masyarakat memeluk agama budha namun juga ada sebagian masyarakat yang memeluk agama hindu dan islam yang sedang berkembang pada waktu itu (Kaelan, 2013). Hubungan tokoh agama islam di Nusantara dengan para raja membuktikan bagaimana pesantren secara tidak langsung mempunyai peran dalam politik kerakyatan, politik kebangsaan dan politik kekuasaan.

Bentuk dari politik kerakyatan yaitu demokrasi yang mengedepankan rakyat sebagai dasar dan tujuan utama dalam politik melalui konsep yang pernah dikemukakan oleh Kenedy yaitu “from the people, for the poeple, and by the people”(Sari & Estika, 2003). Konsep ini sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan yang konsep sesungguhnya bukan raja sebagai penguasa mutlak, pemilik tanah seperti dalam konsep feodalisme dan juga raja bukan sebagai manifestasi dari tuhan seperti dalam konsep teokrasi, namun raja sebagai polisi bagi kehidupan rakyat. Jejak kesalahpahaman tersebut dapat ditelusuri dari kehidupan kerajaan-kerajaan yang saat ini masih ada di Indonesia yang selalu berkaitan dengan konsep spiritualitas namun bukan teokrasi. Sedangkan bentuk politik kebangsaan di Indonesia yaitu bhineka tunggal ika yang mengedepankan suku bangsa sebagai dasar dan tujuan utama politik melalui konsep keberagaman dalam kehidupan bernegara. Sedangkan bentuk politik kekuasaan yaitu pemilihan umum yang saat ini dilaksanakan bangsa Indonesia dalam menentukan pemimpin daerah maupun pusat. Dalam pelaksanaan politik kerakyatan, kebangsaan, dan kekuasaan tentunya harus disesuaikan dengan kaidah kehidupan bangsa Indonesia yaitu Pancasila.

Tragedi 10 November di Surabaya memperlihatkan bahwa pondok pesantren selalu dan akan siap sedia mengambil peran terdepan dalam politik kerakyatan dan politik kekuasaan. Peran tersebut ditandai dengan resolusi jihad yang dikeluarkan oleh KH. Hasyim Asyari (Sunyoto, 2016), melalui resolusi tersebut santri tidak sedikit yang mengorbankan jiwa dan raganya kedalam medan pertempuran untuk menegakkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan rakyat Indonesia. Sekalipun di pondok pesantren tidak terdapat pendidikan politik yang diajarkan dalam mata ajar khusus melalui kitab dan kurikulum yang sudah ditentukan, namun ketahanan politik santri salaf sangat baik. Pendidikan politik yang dilakukan di pondok pesantren tradisional yaitu mendidik jiwa warga negara dalam bentuk pelaksanaan pendidikan moral dan spiritual yang berkesinambungan melalui pembimbingan langsung dari kyai sebagai tauladan utama di pondok pesantren.

2. Pemikiran “Jiwa” Ki Ageng Suryomentaraman

Ki Ageng Suryomentaraman merupakan salah satu guru para pendiri negara Indonesia diantaranya yaitu Soekarno selain itu juga seorang yang telah mendirikan tentara PETA yang pada akhirnya menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia. Ki Ageng merupakan salah satu pendiri taman siswa bersama Ki Hadjar Dewantara, yang dalam proses pendidikan di taman siswa Ki Ageng menjadi guru bagi peserta didik dewasa sedangkan peserta didik usia dasar dan menengah menjadi tanggung jawab dari Ki Hadjar Dewantara. Pemikiran-pemikiran besar Ki ageng diilhami dari proses pencarian jati diri melalui penemuan diri dengan sosok manusia (Nasruddin Anshoriy Ch & Sukmantoro, 2014).

Manusia yang dimaksudkan Ki Ageng yaitu dirinya sendiri, artinya sebuah pencarian jati diri dengan melalui proses laku spiritualitas yang terdapat dalam beberapa ajaran agama. Pola perjalanan Ki Ageng sama dengan Sidharta yang meninggalkan tahtanya hanya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang selama ini memnuhi relung jiwanya. Pertanyaan tersebut berkenaan dengan hakikat

hidup manusia dan hakikat manusia itu sendiri. Dalam tradisi Jawa ada istilah “ngelmu iku kalakone kanthi laku”, tradisi “laku” menjadi ciri khas dari manusia Jawa untuk mendapatkan pengetahuan dan yang dibalik pengetahuan. “Laku” inilah yang dilakukan oleh Ki Ageng Suryomentaraman dalam mencari manusia atau aku yang sejati. Dalam proses “laku”, setiap pengetahuan yang didapat harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata agar diperoleh pengalaman sebagai bahan evaluasi untuk selanjutnya diperbaiki (Wikipedia, 2018).

Ki Ageng Suryomentaraman menemukan manusia atau aku yang sejati ketika mendapati dirinya sendiri tercebur kedalam sungai dan hampir tenggelam karena putus asa ditinggal oleh orang yang disayangi oleh Ki Ageng yaitu kakek dan isterinya. Dalam proses akan tenggelam tersebut, Ki Ageng mendapati pengalaman adanya aku yang lain dalam dirinya melihat aku yang akan tenggelam. Dari pengalaman tersebut Ki Ageng menemukan konsep jiwa “kramadangsa” yang dideskripsikan melalui figur dibawah ini (Suryomentaraman, 1985).

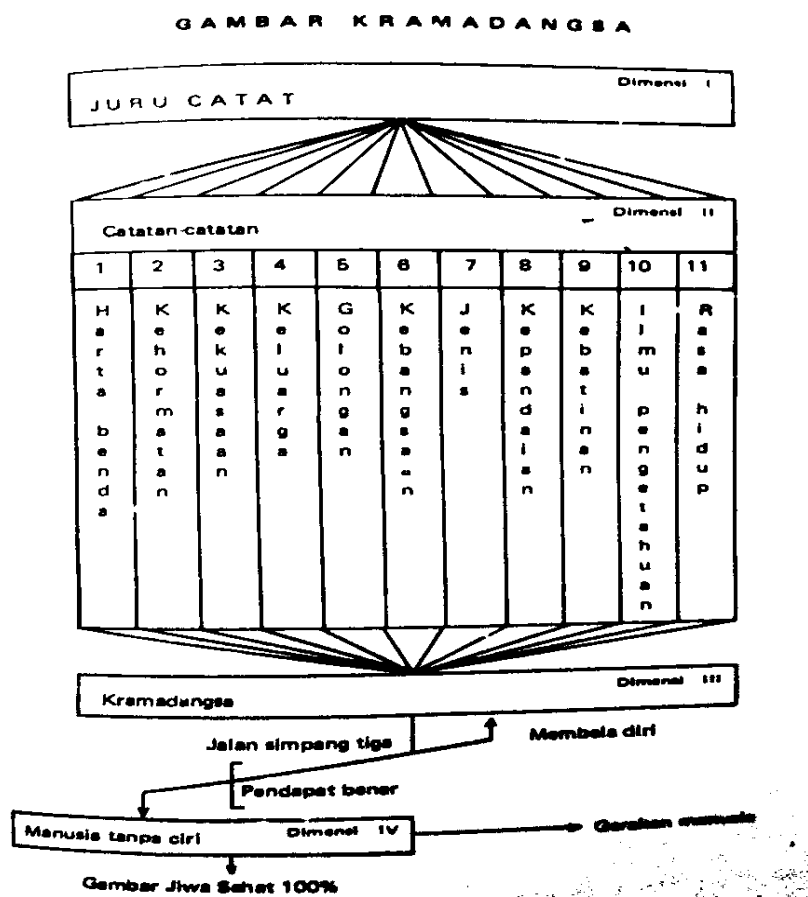


Figure 1. Konsep Jiwa Kramadangsa

Juru catat pada dimensi pertama merupakan unsur pengetahuan manusia yang diperoleh sejak lahir sampai pada akhir hidup manusia, sedangkan pada dimensi kedua merupakan rasa manusia yang dipersepsikan oleh KAS dari pengalaman selama mencari sosok manusia yang terdiri dari harta benda, kehormatan, kekuasaan, keluarga, golongan, kebangsaan, jenis, kepandaian, kebatinan, ilmu pengetahuan, dan rasa hidup. Pada dimensi ketiga yaitu yang dinamakan oleh KAS sebagai jiwa kramadangsa yang artinya jiwa yang memiliki nama yang menunjukkan kekhasan individu, jiwa yang memiliki nama. Jiwa kramadangsa sering merasakan kebingungan karena harus melayani 11 rasa manusia yang ada pada dimensi ke dua. Seperti dicontohkan oleh KAS ketika manusia merasakan amarah, seseorang yang merasakan amarah pasti mempunyai pilihan melampiaskan amarahnya atau menahan amarahnya. Padahal baik melampiaskan atau menahan amarah sebenarnya masih sama-sama merupakan amarah, masih aku yang punya nama yang mempunyai ciri khas.

Namun jiwa kramadangsa ini sesungguhnya selalu berkomunikasi dengan jiwa manusia yang tanpa ciri yang juga terdapat pada semua manusia. Ketika seseorang tersebut diam tidak melampiaskan

amarah dan tidak menahan amarah serta dapat melihat si aku yang marah, sesungguhnya seseorang tersebut berada pada jiwa manusia yang tanpa ciri atau jiwa sejati. Jiwa manusia yang tanpa ciri tersebut merupakan jiwa yang merdeka dan bahagia, karena tidak terikat oleh apapun (Kholik & Himam, 2015). Pemikiran jiwa Ki Ageng merupakan inti dari setiap ajaran agama apapun, yaitu pencarian diri terhadap diri yang sejati yang berakhir pada penemuan diri pada sang pencipta alam semesta seperti yang dilalui oleh Shidarta maupun Ibrahim. Proses pencarian tersebut merupakan “laku”, yang menjadi inti dari pendidikan jiwa manusia dan pada akhirnya termanifestasikan dalam jiwa warga negara. Pendidikan jiwa warga negara merupakan inti dari pendidikan politik.

3. Membangun jiwa warga negara di Pondok Pesantren Putra Menara Al Fattah

Warga negara merupakan unsur utama dari sebuah negara selain wilayah, pemerintahan yang sah, dan pengakuan dari negara lain. Sebagai unsur utama, bagaimana warga negara akan mempengaruhi bagaimana negara tersebut. Warga negara Indonesia terdiri dari 1340 suku bangsa yang tersebar dari sabang sampai merauke (Suryadinata, Leo; Nurvidya Arifin, Evi; Ananta, 2003). Keberagaman tersebut sudah ada sejak masa pra sejarah Indonesia artinya sebelum negara Indonesia terbentuk, namun demikian meski diwarnai berbagai bentuk konflik, masyarakat hidup berdampingan dan saling menjaga satu sama lain. Kerukunan antar suku bangsa tersebut diabadikan dalam semboyan “*bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” yang artinya terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu (Lestari, 2015).

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, tercatat tiga kali terikat dalam sebuah negara yaitu pada zaman Sriwijaya, Majapahit, dan terakhir terbentuknya negara Indonesia. Selama perjalanan tersebut bangsa Indonesia terpecah, terpisah, dan bersatu kembali. Keterpecahan tersebut dikarenakan perebutan kekuasaan yang terjadi didalam keluarga kerajaan dan ada pihak ketiga yang memecah belah kerajaan tersebut. Kerajaan yang terpecah belah pada akhirnya “*sirna ilang kertaning bumi*” atau hilang lenyap ditelan bumi, meski begitu pada akhirnya muncul kembali kerajaan baru yang menyatukan suku bangsa menjadi sebuah bangsa yang besar. Artinya negara bisa saja hilang namun warga negara yang terdiri dari suku bangsa tetap ada secara turun temurun. Untuk itu keutuhan sebuah negara bergantung pada warga negara, seperti jepang melalui restorasi meiji yang mengubah warga negara jepang untuk mengejar ketertinggalan dari peradaban barat yaitu eropa dan amerika (Akamatsu, 1972).

Program pemerintah untuk membangun warga negara menjadi berkualitas dan berdaya saing internasional telah dilakukan, terlihat dari usaha pemerintah untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Namun masalah moral belakangan telah menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya, mengingat banyak kasus korupsi oleh penyelenggara pemerintah dan penegak hukum. Bahkan seringkali wakil rakyat maupun pejabat pemerintah memperlihatkan keteladanan yang buruk dalam kehidupan sehari-hari. Moral terdapat dalam jiwa manusia, sehingga mempersoalkan moral berarti mempersoalkan jiwa manusia. Maka membangun warga negara berarti membangun jiwa warga negara, seperti yang terdapat dalam lagu nasional Indonesia raya “.....bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.....” (CNN, 2018).

Jiwa merupakan bagian yang tidak bisa dilihat oleh pancaindera namun terdapat dalam diri manusia yang bersifat mendasar dalam kehidupan manusia. Jiwa atau *Soul* merupakan perangkat lunak manusia yang menentukan manusia untuk bergerak baik atau buruk. Aspek utama dalam membangun jiwa manusia yaitu melalui keteladanan oleh pemimpin bangsa maupun negara. Pemimpin yang baik akan menjadikan pejabat baik, dan pejabat yang baik akan menjadikan rakyat baik (muhammad, 2013). Keteladanan merupakan aspek informal dalam pendidikan, namun mempunyai peran yang signifikan dalam proses pendidikan dan kebudayaan.

Pondok pesantren tradisional sebagai lembaga pendidikan informal menjadi instrumen penting dalam membangun jiwa warga negara. Kejiwaan seseorang dididik melalui proses tradisi yang mempunyai tatanan keadaban memungkinkan pesantren menjadi efektif dan efisien dalam membentuk jiwa warga negara. Perbedaan mencolok dalam proses pendidikan pesantren dengan pendidikan formal adalah dalam mengkonstruksi pengetahuan. Konstruksi pengetahuan dalam pendidikan formal sudah didesain sedemikian rupa untuk memaksimalkan potensi akal pikiran manusia. Sedangkan didalam pondok pesantren tradisional tidak ada perencanaan yang pasti namun setiap proses selalu diarahkan pada bagaimana manusia bisa mengendalikan potensi hati, sehingga dalam mempelajari sebuah ilmu juga harus menghormati dan mengagungkan guru sebagai suri tauladan dalam mengamalkan ilmu yang telah didapat. Potensi hati dalam jiwa manusia yang sudah dapat dikendalikan terwujud dalam “*memayu*

hayuning pribadi, memayu hayuning kulawarga, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawana” artinya berbuat baik pada diri sendiri, berbuat baik pada keluarga, berbuat baik pada sesama, dan berbuat baik pada alam semesta. Hubungan diantara keempat aspek tersebut yaitu tergambar melalui figur sebagai berikut.

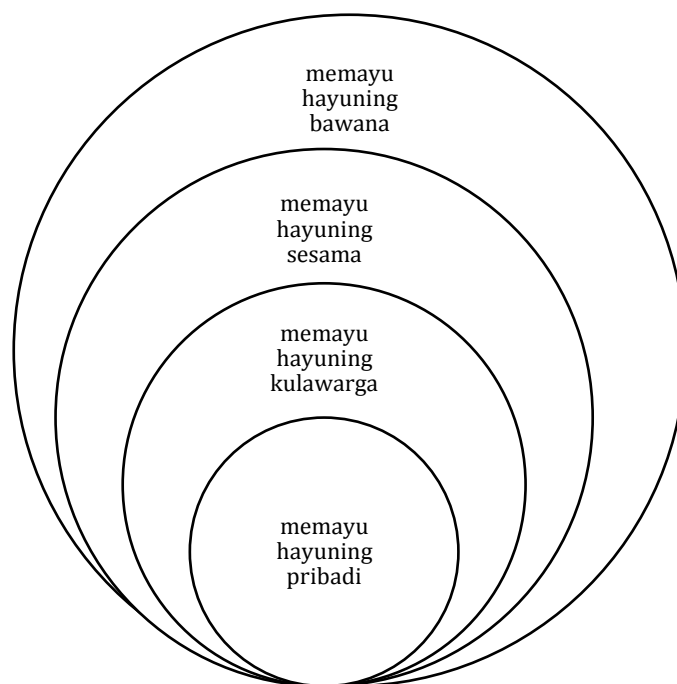


Figure 2. Konsep Jiwa Warga Negara

Simpulan

Jiwa warga negara terdapat dalam aspek “memayu hayuning sesama”, dimana setiap orang harus dan wajib menjaga hak orang lain. Bentuk dari jiwa warga negara yaitu “rasa aku memiliki negara”, artinya ketika setiap orang Indonesia merasa memiliki negara, sudah pasti akan mempertahankan keutuhan negara tanpa harus diberitahu. Mendidik politik secara formal yaitu melalui lembaga dan tanpa lembaga. Melalui lembaga diantaranya yaitu bakesbangpol dan partai politik. Namun apabila mendidik politik secara substansial berarti mendidik jiwa warga negara, yang justru peran tersebut sudah dilakukan secara turun temurun melalui pondok pesantren tradisional. Pelaku politik adalah manusia, untuk itulah mendidik politik berarti mendidik jiwa manusia yang hanya dilakukan oleh lembaga agama diantaranya yang sudah ada sejak zaman pra sejarah Indonesia yaitu pondok pesantren. Untuk itu sesungguhnya kekuatan negara terletak pada warga negara, dan kekuatan warga negara terletak pada jiwa warganya. Membangun negara berarti membangun jiwa warga negara, untuk membangun jiwa warga negara yaitu melalui pemahaman atas pengetahuan dan pengamalan warga negara.

Referensi

- Akamatsu, P. (1972). *Meiji 1868: Revolution and Counter-Revolution in Japan*. New York: Harper & Row.
- Azis Wahab, A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. (Riduwan & A. Rohimayati, Eds.) (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. (2018). Arti kata jiwa - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Retrieved September 7, 2018, from <https://kbbi.web.id/jiwa>
- Baihaki, eki. (2018). Bicara Baik di Tahun Politik - Kompas.com. Retrieved September 7, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/04/11151441/bicara-baik-di-tahun-politik>
- CNN. (2018). (50) Lagu Indonesia Raya 3 Stanza ; Lagu Kebangsaan Indonesia Raya -

- YouTube. Retrieved September 7, 2018, from https://www.youtube.com/watch?v=5rX1EF_VzeE
- Dewantara, K. H. (2013). *Ki Hadjar Dewantara; Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka* (5th ed.). Yogyakarta: UST Pers dan Majelis Luhur Taman Siswa.
- Dofir, Z. (2011). *Tradisi Pesantren* (1st ed.). Jakarta: LP3ES.
- Herman. (2013). Sejarah Pesantren Di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*.
- Kaelan. (2013). *Negara Kebangsaan Pancasila* (1st ed.). Yogyakarta: Paradigma.
- Kholik, A., & Himam, F. (2015). Konsep Psikoterapi Kawruh Jiwa Ki Ageng Suryomentaram. *Gajah Mada Journal of Psychology*, 1(2), 120–134.
- Lestari, G. (2015). Bhinneka Tunggal Ika : Khasanah Multikultural. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*.
- Muchlishon, ahmad. (2016). Kang Said Jelaskan Kekhasan Pengajaran di Pesantren | NU Online. Retrieved September 7, 2018, from <http://www.nu.or.id/post/read/66546/kang-said-jelaskan-kekhasan-pengajaran-di-pesantren>
- muhammad, agus. (2013). Mencari Pemimpin yang Baik - Kompas.com. Retrieved September 7, 2018, from <https://nasional.kompas.com/read/2013/08/22/1036113/Mencari.Pemimpin.yang.Baik>
- Nasruddin Anshoriy Ch, H., & Sukmantoro, J. (2014). *Kawruh Begjo Ki Ageng Suryomentaraman; Pencarian Hakikat Kebahagiaan* (1st ed.). Yogyakarta: Ilmu Giri dan Jihan Institute.
- Sari, & Estika. (2003). Demokrasi dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Politik Kenegaraan*, 2(1), 21–28. Retrieved from <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/view/2541>
- Sunyoto, A. (2016). Resolusi Jihad NU dan Perang Empat Hari di Surabaya | NU Online. Retrieved September 7, 2018, from <http://www.nu.or.id/post/read/72250/resolusi-jihad-nu-dan-perang-empat-hari-di-surabaya->
- Suryadinata, Leo; Nurvidya Arifin, Evi ; Ananta, A. (2003). *Indonesia's Population: Ethnicity and Religion in a Changing Political Landscape*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Suryomentaraman, K. A. (1985). *Ajaran-Ajaran Ki Ageng Suryomentaraman Jilid 2* (1st ed.). Jakarta: Idayu Press.
- Wikipedia. (2013). Politik balas budi - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas. Retrieved September 7, 2018, from https://ms.wikipedia.org/wiki/Politik_balas_budi
- Wikipedia. (2018). Wulang Reh - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas. Retrieved September 7, 2018, from https://id.wikipedia.org/wiki/Wulang_Reh